



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERAN PENTING PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SUAHASIL NAZARA

Koordinator Pokja Kebijakan

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

JAKARTA, 13 MEI 2014

Determinan Kemiskinan di Tingkat Daerah (1)

- **Kapasitas untuk Menghasilkan Pendapatan di Tingkat Daerah**
 - **Sumber utama pendapatan masih berupa kiriman dana dari Pemerintah Pusat**
 - Pada 2011, rata-rata 91% pendapatan kabupaten berasal dari Pemerintah Pusat
 - Selain itu, hampir 64% belanja langsung di dalam kabupaten juga berasal dari Pemerintah Pusat
 - **Pemerintah daerah mampu menghasilkan pendapatannya sendiri**
 - Bukti berupa kerugian/kerusakan bagi iklim investasi dengan adanya regulasi yang kompleks dan problematis yang sering kali tumpang-tindih dengan regulasi nasional
 - Keberadaan sumber daya alam merupakan determinan kunci tentang jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan oleh daerah

Determinan Kemiskinan di Tingkat Daerah (2)

■ Kinerja dalam Pelayanan Publik

➤ Kemampuan Fiskal

- Di sektor pendidikan, Kabupaten Badung (Bali) membelanjakan dana sebesar hampir 250 juta rupiah di luar dana yang disediakan oleh Pemerintah Pusat pada 2008, sedangkan Kabupaten Mamuju Utara (Sulawesi Barat) mengalokasikan dana kurang dari 40 juta rupiah untuk bidang pendidikan pada tahun yang sama. Dalam hal belanja per kapita, Badung membelanjakan dana 50% lebih besar daripada Mamuju.

➤ Kapasitas Teknis

- Sekitar dua pertiga desa di Indonesia, khususnya di kawasan timur, masih tidak memiliki akses ke jaringan telekomunikasi
- Belanja pemerintah daerah lebih banyak dilakukan untuk gaji pegawai daripada untuk layanan
- Kurangnya akuntabilitas di tingkat daerah

Determinan Kemiskinan di Tingkat Daerah (3)

■ Aspek Tata Kelola Desentralisasi

- Pengaturan kewenangan pemerintah daerah harus berjalan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal daerah
- Sehausnya desentralisasi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi

■ Kapasitas Kelembagaan Kabupaten untuk Penanggulangan Kemiskinan

- **TKPK: mengawasi dan mengoordinasikan rancangan dan pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah**
- **Tanggung jawab utama TKPK:**
 - Pengelolaan dan pengembangan indikator kemiskinan daerah.
 - Pengembangan sistem informasi kemiskinan.
 - Pembentukan sistem peringatan dini mengenai isu-isu kemiskinan

Perkembangan TKPK

■ Provinsi

- Seluruh (34) provinsi sudah memiliki TKPK (Mar 2014)
- 100% provinsi sudah melaksanakan Rakor

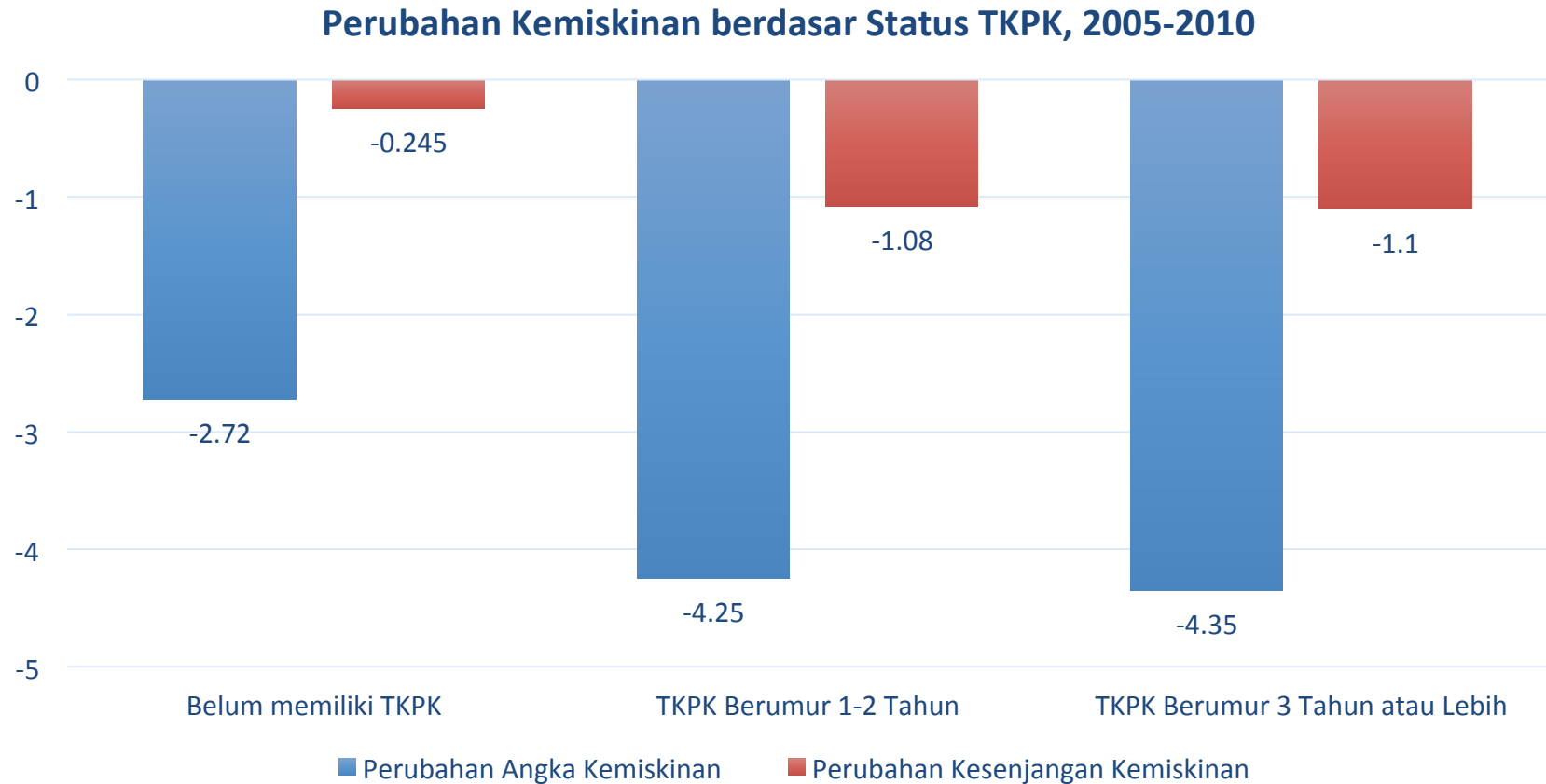
■ Kabupaten/Kota

- Sebagian besar (465 atau 91,4%) kabupaten/kota sudah memiliki TKPK (Des 2013)
- 75% kabupaten/kota sudah melaksanakan Rakor

■ 100 Wilayah Prioritas

- Masih terdapat 11 wilayah prioritas yang belum memiliki TKPK (Des 2013)
- 18 dari 89 wilayah prioritas yang memiliki TKPK tidak melaksanakan Rakor
- 83 dari 89 wilayah prioritas yang memiliki TKPK belum menyelesaikan LP2KD Tahun 2013

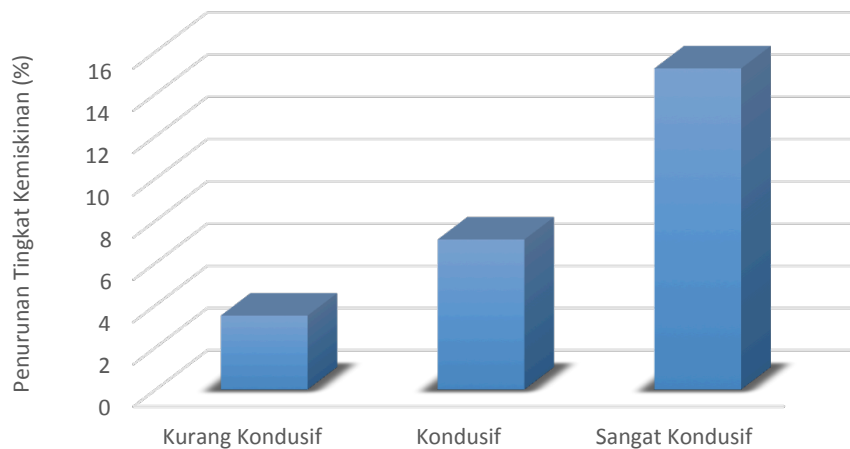
Kaitan Antara TKPK dan Penanggulangan Kemiskinan



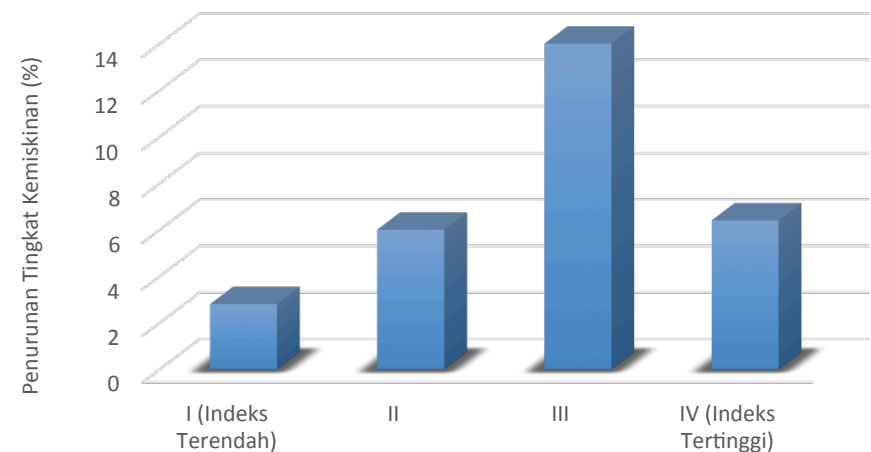
- Kabupaten yang telah membentuk TKPK mampu mengurangi tingkat kemiskinan dengan skala lebih besar dibandingkan kabupaten yang belum membentuk TKPK

Kaitan Antara *Governance* dan Kemiskinan

Tingkat Pengentasan Kemiskinan Kabupaten berdasar Indeks Budaya Birokrasi (KPPOD), 1999 dan 2002



Tingkat Pengentasan Kemiskinan Kabupaten berdasar Indeks Pemerintahan (LPEM), 1999 dan 2002



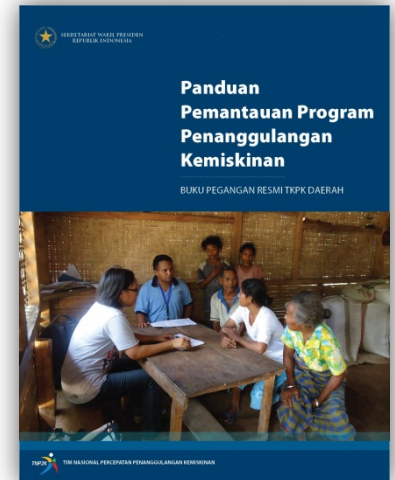
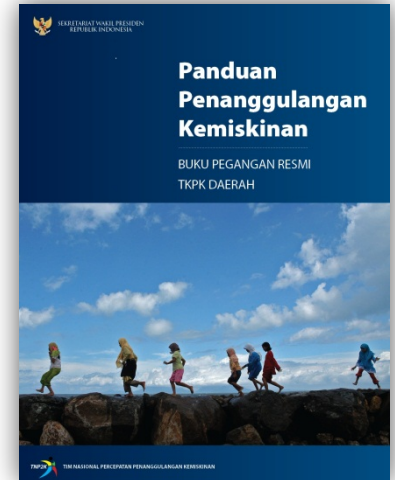
- Desentralisasi dapat menciptakan sinergi antara pengentasan kemiskinan dan *good governance*
- Kelembagaan (baik di tingkat pusat maupun daerah) perlu diperkuat

Peran Penting Pemerintah Daerah Melalui TKPK

TKPK

- Hasil analisis kondisi kemiskinan
- Hasil analisis prioritas intervensi dan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan
- Hasil evaluasi anggaran daerah untuk penanggulangan kemiskinan

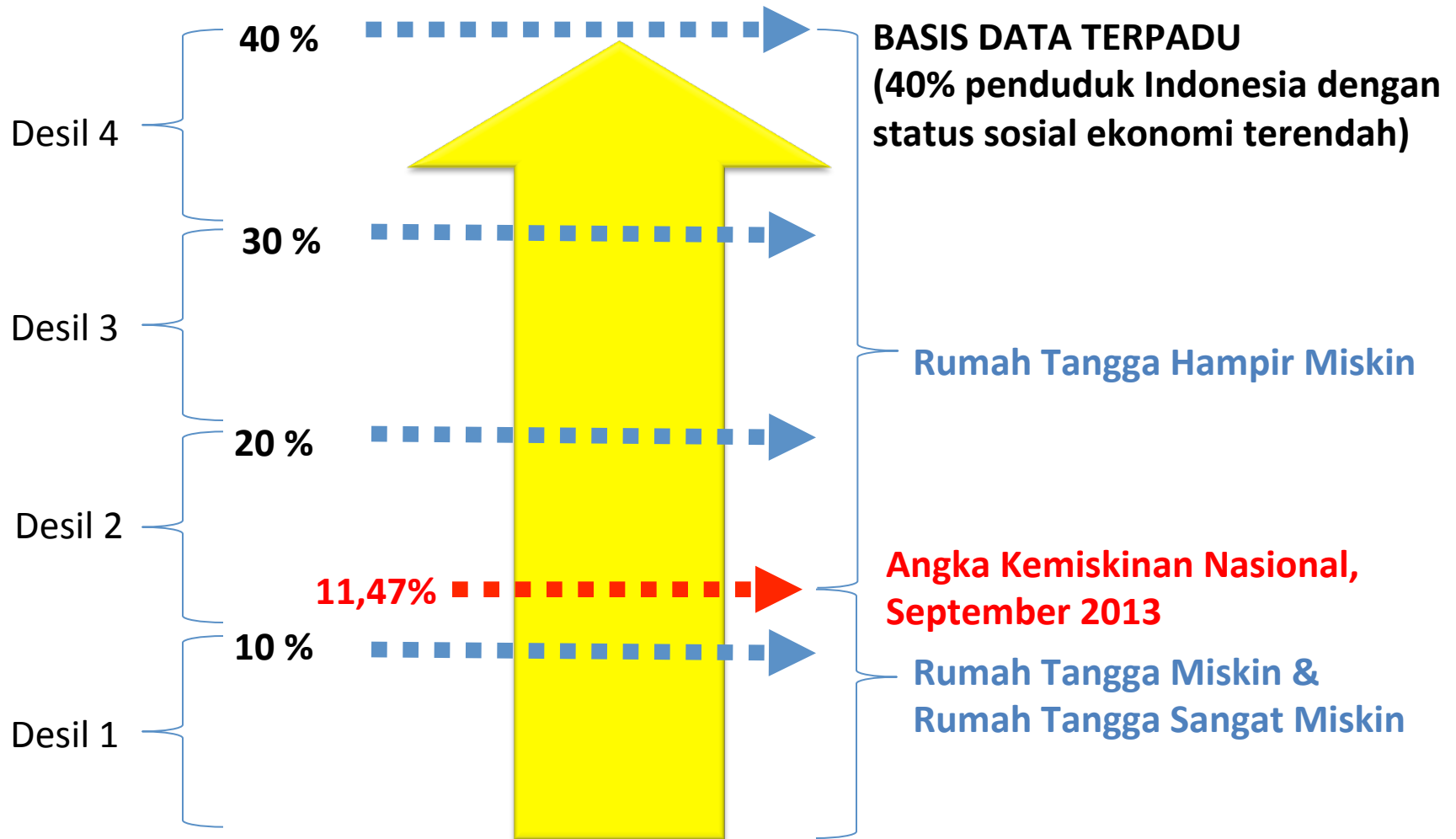
- Hasil pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah
- Koordinasi dan pengendalian efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah



Pendekatan Penargetan Penanggulangan Kemiskinan



Penargetan Individu dan Rumah Tangga



Pemanfaatan Basis Data Terpadu

Kriteria Kepesertaan
Program Perlindungan Sosial

Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program



Basis Data Terpadu Untuk
Program Perlindungan Sosial

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu



Jamkesmas

Subsidi
Siswa
Miskin

Program
Keluarga
Harapan

Raskin

*Daftar nama dan alamat individu/
keluarga/ rumah tangga **SASARAN**
masing-masing program*

Program Perlindungan Sosial lainnya
Dengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga

3 Jenis Data Basis Data Terpadu

Data Agregat/Distribusi tingkat Kecamatan

- Untuk keperluan perencanaan program
- Pengguna: pemerintah pusat maupun daerah
- Dapat diakses melalui website TNP2K

Data Individu TANPA Nama & Alamat

- Untuk tujuan analisis atau perencanaan
- Pengguna: instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, NGO, dll
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna (+proposal penelitian bila untuk penelitian)

Data Individu DENGAN Nama & Alamat

- Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial
- Pengguna: kementerian/lembaga dan instansi pelaksana program, baik di pusat maupun daerah
- Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi deskripsi dan sasaran program + Pernyataan Integritas Penggunaan Data (untuk ikut menjaga integritas data)

Pemanfaatan Data

- Menyusun desain program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- Menentukan prioritas intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- Pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan daerah

TERIMA KASIH